

ABSTRAK

Asmaul Husna Lambo (1215010030) : Peran A.M Fatwa Dalam Proses Reformasi Keadilan di Indonesia Tahun 1998 – 2017

Reformasi Indonesia tahun 1998 menjadi tonggak penting dalam perubahan sistem politik, hukum, dan sosial. Di tengah perubahan besar itu, muncul tokoh-tokoh yang membawa semangat pembaruan, salah satunya A.M. Fatwa. Sebagai mantan tahanan politik dan aktivis oposisi di era Orde Baru, A.M. Fatwa memainkan peran penting dalam memperjuangkan sistem hukum yang lebih adil dan demokratis pasca runtuhnya rezim Soeharto. Latar belakang kehidupannya sebagai ulama, politisi, dan pejuang HAM memberi warna tersendiri dalam dinamika reformasi keadilan di Indonesia.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab dua rumusan masalah utama: *pertama* bagaimana kondisi Indonesia menjelang keruntuhan Pemerintahan Soeharto pada Tahun 1998, *kedua* bagaimana peran A.M. Fatwa dalam proses reformasi keadilan di Indonesia selama periode 1998–2017.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, yaitu jenis penelitian yang mempelajari peristiwa di masa lampau berdasarkan jejak – jejak yang ditinggalkan. Dalam penelitian ini, dilakukan melalui beberapa proses dan tahapan, yaitu Heuristik (Pengumpulan Sumber), kritik (Verifikasi Sumber), Intepretasi (Penafsiran Sumber), Historiografi (Penulisan Sejarah).

Menjelang kejatuhan Orde Baru, Indonesia menghadapi krisis politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintahan Soeharto mempertahankan kekuasaan melalui dwifungsi ABRI, pembungkaman pers, dan hukum represif. Krisis moneter 1997–1998 memperparah keadaan hingga memicu Reformasi 1998 dan pengunduran diri Soeharto. Pasca-reformasi, Indonesia memasuki era demokratisasi dengan kebebasan politik, pemilu terbuka, dan penguatan masyarakat sipil. Penelitian ini menunjukkan bahwa A.M. Fatwa berperan penting dalam reformasi keadilan 1998–2017. Sebagai mantan tahanan politik Orde Baru, ia konsisten memperjuangkan keadilan dan HAM. Di parlemen, ia terlibat dalam amandemen UUD 1945, memperkuat pemisahan kekuasaan, membentuk Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta mendorong lahirnya UU Pengadilan HAM dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM seperti Tragedi Tanjung Priok. Dalam kiprahnya sebagai anggota DPR, Wakil Ketua MPR, dan Senator DPD, A.M. Fatwa membela hak rakyat, mengadvokasi keadilan transisional, dan mengkritik kekuasaan yang tidak adil. Bagi dirinya, keadilan adalah panggilan moral sekaligus wujud nyata keberpihakan kepada korban ketidakadilan.